

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

Oleh:

**SUNLY
NPM:1403100101**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : SUNLY
N P M : 1403100101
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA
SUBULUSSALAM**

Medan, 15 Maret 2018

Pembimbing


Dr. ARIFIN SALEH, M.SP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Plt Dekan,



Dr. BUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **SUNLY**
N P M : 1403100101
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, tanggal : Kamis, 15 Maret 2018
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd** (.....)
PENGUJI II : **IDA MARTINELLY, SH, MM** (.....)
PENGUJI III : **Dr. ARIFIN SALEH, M.SP** (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua,


Dr. RUDIANTO, M.Si



Sekretaris,


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **SUNLY**, NPM : 1403100101 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian saya batalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan,


SUNLY



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Slc-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Sunly
 N P M : 1403100101
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara (kebygakan)
 Judul Skripsi : Implementasi peraturan menteri kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman jaminan kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum daerah kota sibulussacam

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	15-01-2018	Bimbingan perbaikan proposal bab I sampai bab III	
2	19-01-2018	perbaikan latar belakang masalah	
3	22-01-2018	perbaikan penusunan bab II ditambah teori	
4	24-01-2018	perbaikan bab III Narasumber	
5	26-01-2018	bimbingan pedoman wawancara	
6	29-01-2018	Acc draft wawancara	
7	6-03-2018	perbaikan bab IV pembahasan	
8	8-03-2018	perbaikan kesimpulan dan saran	
9	9-03-2018	perbaikan abstrak	
10	10-03-2018	Acc skripsi mega hijau	

Medan, ...10.....maret.....2018...

Dekan,

 (Dr. Budianto, M.Si)

Ketua Program Studi,

 (Naili Khairiah S.I.P, M.Pd)

Pembimbing ke : 1.

 (Dr. Arifin Saieh, M.sp)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN JAMINAN KESEHATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

SUNLY

NPM:1403100101

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan, merupakan salah satu peraturan yang dapat digunakan pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Dengan dasar ini maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 memiliki peranan penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam apakah sudah dijalankan dengan baik atau belum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari tujuh narasumber untuk mendeskripsikan jaminan kesehatan nasional dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, melalui wawancara terbuka dengan pihak rumah sakit dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam terimplementasikan dengan baik. Pelaksanaan keputusan kebijakan di RSUD Kota Subulussalam berjalan dengan baik pihak RSUD memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan jaminan kesehatan, program yang terlaksanakan yaitu program bidang medis seperti peningkatan mutu SDM jajaran medis dan pramedis, peningkatan pelayanan medis spesialis dasar dan pelayanan medis spesialis penunjang, menyelenggarakan fungsi pelayanan operatif dan pelayanan intensif, Pembangunan Sarana dan prasarana medis, pengadaan alat kesehatan pada setiap unit pelayanan dan program bidang non medis seperti peningkatan mutu SDM jajaran non medis investasi alat-alat non medis pemeliharaan & perbaikan sarana, prasarana dan peralatan. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang medis. Tujuan yang dicapai belum berjalan baik karena pihak rumah sakit kekurangan sumber daya manusia seperti kurangnya dokter spesialis karena banyak masyarakat membutuhkan dokter spesialis dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 harus ditingkatkan semaksimal mungkin agar pelayanan kesehatan meningkat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Jaminan Kesehatan Nasional, Pelayanan Kesehatan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun di akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul : **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN JAMINAN KESEHATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SUBULUSSALAM”**. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Teristimewa dan yang paling utama, kepada Ayahanda penulis Sahril Berutu dan Ibunda tercinta Erawati serta saudara kandung saya yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Rudianto M.Si selaku Plt Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Arifin Saleh M.SP selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan kesempatan kepada penulis selama menyusun skripsi.
6. Dosen – dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan biro yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi penulis.
8. Bapak dr. Sarifin Kombih selaku direktur RSUD Kota Subulussalam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

10. Kepada teman – teman kampus UMSU yang telah memberikan semangat dan banyak masukan kepada penulis .
11. Kepada sahabat – sahabat seperjuangan Dessy Mei Linda, Ririn Dwi Lestari, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Kepada sahabat-sahabat terkasih Dinda Novia Ramadhani, Ayu Ariga, Audhina Putri Rahby, Fitria Rahma Sambo, Sarah Devi Meina sambo yang selalu memberikan dukungan dan semangat terhadap penulis.
13. Kepada seluruh teman – teman seperjuangan kelas C – sore IAN konsentrasi Kebijakan Publik khususnya Rahmadani, Nur Azizah, Rahmad Ilhamsyah Rambe sahabat – sahabat yang telah banyak menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Konsep Implementasi	8
1. Pengertian Implementasi	8
2. Pengertian Implementasi Kebijakan	9
3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	10
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kebijakan	12
B. Kebijakan publik	13
1. Pengertian Kebijakan	13
2. Pengertian Kebijakan Publik	14
3. Unsur-unsur kebijakan	15

4. Proses pembuatan kebijakan.....	16
5. Faktor penghambat kebijakan.....	18
6. Analisis kebijakan publik	19
C. Pelayanan kesehatan	20
1. Pengertian pelayanan kesehatan	20
2. Pengertian kesehatan	21
D. Jaminan Kesehatan Nasional	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	26
B. Kerangka Konsep	26
C. Definisi konsep	27
D. Kategorisasi	29
E. Narasumber	30
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data	31
H. Lokasi Penelitian	31
I. Deskripsi Lokasi Penelitian	32
1. Gambaran kondisi kota subulussalam	32
2. Gambaran umum tetntang kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam	33
3. Uraian kedudukan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil penelitian	46
B. Pembahasan	61

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	27
Gambar 3.2 Struktur Organisasi	38

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategorisasi Peneliti.....	29
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan	33
Tabel 3.3 Kunjungan Berdasarkan Kepersertaan.....	40
Tabel 3.4 Jumlah Kunjungan Pasien Igd	41
Tabel 3.5 Pelayanan Laboratorium.....	43
Tabel 4.6 jumlah Item Obat	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran III	: Daftar Jawaban Wawancara
Lampiran IV	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran V	: Permohonan Perubahan Judul skripsi
Lampiran VI	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran VII	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VIII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran IX	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran X	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran XI	: Surat Keterangan Penelitian Oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam
Lampiran XII	: SK-6 Permohonan Ujian Skripsi
Lampiran XIII	: SK-7 Surat Pernyataan
Lampiran XIV	: SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM), setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat dengan upaya menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan nasional. Pemerintah sebagai institusi tertinggi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan dan harus memenuhi kewajiban dalam menyediakan sarana pelayanan kesehatan. Pembangunan dalam bidang kesehatan diarahkan guna mencapai kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk bisa hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sehingga dapat mempertinggi produktifitas dan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia. Pada dasarnya kesehatan merupakan hal penting karena dalam peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan dan karenanya mempunyai andil yang cukup besar dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dan juga telah ditetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh

pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat baik individu, keluarga, berhak memperoleh pelayanan atas kesehatan dan pemerintah bertanggung jawab merancang, mengatur menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pembangunan kesehatan merupakan kunci dasar dalam meningkatkan pembangunan bidang lainnya, dengan kata lain kesehatan merupakan kebutuhan manusia yang utama dan menjadi prioritas yang mendasar bagi kehidupan. Pelaksanaan kesehatan melibatkan seluruh masyarakat Indonesia hal tersebut dapat dimengerti karena kesehatan mempunyai hubungan yang dinamis terhadap bidang lainnya. Keberhasilan bidang kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat masyarakat di pusat-pusat pemerintahan (terutama kota kota besar) telah meningkat pula kebutuhan akan pelayanan kesehatan masyarakat yang semakin meluas dan lebih baik di seluruh tanah air.

Mengingat status sosial masyarakat yang berbeda-beda adanya permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat proses pelayanan kesehatan antara lain adalah masih tingginya status kesehatan antar tingkat sosial, ekonomi, antar kawasan, perkotaan dan pedesaan. Secara umum status kesehatan penduduk dengan tingkat sosial ekonomi tinggi, dan di kawasan perkotaan cenderung lebih baik, sebaliknya status kesehatan penduduk sosial ekonomi rendah masih belum baik. Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program JKN di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang

diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial yang bertujuan agar seluruh rakyat Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran yang telah dibayarkan oleh pemerintah.

Sasaran dalam pedoman JKN ini adalah seluruh komponen-komponen mulai dari pemerintah (pusat dan daerah), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), fasilitas kesehatan, peserta dan pemangku kepentingan lainnya sebagai acuan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Manfaat jaminan kesehatan nasional terdiri atas dua jenis, yaitu manfaat medis dan manfaat non medis. Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai dengan indikasi medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulan. Manfaat akomodasi untuk layanan rawat inap sesuai dengan hak kelas perawatan peserta. Manfaat ambulance hanya diberikan untuk pasien rujukan antar fasilitas kesehatan, dengan kondisi tertentu sesuai rekomendasi dokter.

Langkah-langkah yang ditempuh salah satunya adalah peningkatan akses kesehatan terutama bagi penduduk miskin melalui program-program pelayanan kesehatan, program kesehatan yang terus dalam perbaikan baik pada kepesertaan, pelayanan, dan pengorganisasian. Meskipun terus dilakukan perbaikan tetapi masih banyak hal yang perlu dibenahi dan belum dapat memenuhi semua pihak.

Program JKN diberlakukan di seluruh Indonesia hingga pelosok desa termasuk wilayah kota Subulussalam Provinsi Aceh. Bagi masyarakat

Subulussalam yang terdaftar sebagai peserta JKN yang iurannya dibayar oleh peserta, ruang perawatan berdasarkan kemampuannya berbeda dengan peserta jaminan kesehatan yang iurannya dibayar oleh pemerintah ruang perawatannya diberikan sesuai dengan yang sudah ditentukan.

Seiring dengan berjalannya waktu BPJS kesehatan ini menuai banyak masalah di lapangan. Permasalahan-permasalahan yang timbul mengakibatkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat, salah satunya yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam yang menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam adalah salah satu layanan kesehatan milik pemerintah Kota Subulussalam yang berbentuk rumah sakit umum, dikelola oleh pemerintah kota dan tercantum kedalam tipe C. Layanan kesehatan ini telah terdaftar semenjak tanggal 07 juni 2011 dengan Nomor Surat Izin 445/655.b/2012 dan tanggal surat izin 02 oktober 2012 dari Walikota Subulussalam dengan sifat tetap. RSUD ini berlokasi di Jalan Subulussalam-Runding km.5 Dusun Rahmah Kec.Simpang Kiri Kota Subulussalam. Tenaga pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Kota Subulussalam saat ini sebanyak 73 orang bidan, 129 orang perawat, 5 orang apoteker , 3 orang perawat gigi, 13 orang tenaga teknis kefarmasian, 14 orang rekam medik, 18 orang analisis kesehatan, 15 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi, 1 orang penataan anastesi di kamar operasi , 1 orang spesialis anak, 1 orang spesialis bedah, 1 orang spesialis obygn, 1 orang spesialis penyakit dalam dan 1 orang spesialis anastesi.

Permasalahan yang terjadi di RSUD Kota Subulussalam adalah pelayanan administrasi pada proses masyarakat yang ingin berobat yaitu dengan permasalahan surat rujukan yang sudah melewati tanggal berlaku sehingga masyarakat harus mendatangi fasilitas kesehatan pertama yaitu Puskesmas atau Klinik untuk membuat rujukan baru. Masalah lain adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur-prosedur dalam menggunakan jaminan kesehatan dan belum adanya terpasangnya aplikasi untuk peserta di RSUD Kota Subulussalam sehingga lebih mempermudah peserta atau pasien BPJS kesehatan dalam mengakses pelayanan kesehatan di RSUD, dan masalah lainnya adalah perbedaan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jaminan kesehatan kelas 3 dengan kelas yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah peneliti ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Nasional dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Jaminan Kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di daerah itu sendiri dan mengusut kejanggalan yang ada.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan fikiran pada pemerintah khususnya dalam hal bagaimana pelayanan yang diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Jaminan Kesehatan
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan, di samping hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab Ini Diuraikan Tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Terdiri Dari : Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Unsur-Unsur Kebijakan, Proses Pembuatan Kebijakan Publik, Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan, Analisis Kebijakan Publik, Pengertian Pelayanan Kesehatan, Pengertian Kesehatan, Program Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab Ini Akan Diuraikan Tentang Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Defenisi Konsep, Katagorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, Tinjauan Ringkas Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Ini Diuraikan Tentang Penyajian Data, Deskripsi Hasil Wawancara Dan Pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab Akan Diuraikan Tentang Simpulan Dan Saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Konsep Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Tahapan penting dari suatu kebijakan publik adalah implementasi. Implementasi selalu dianggap merupakan pelaksanaan dari apa saja yang telah diputuskan oleh suatu instansi pemerintah (pengambilan keputusan) dengan begitu implementasi merupakan tahapan suatu kebijakan yang diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan kebijakan itu.

Menurut Wahab (2008 : 140) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang. Namun dapat pula berbentuk Perintah-perintah atau Keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagi cara untuk mengatur proses implementasinya.

Implementasi adalah kegiatan merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi (Tangkilisan, 2003 : 29).

Van Mater dan Van Hom (2003 : 139) Merumuskan Proses Implementasi sebagai Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/penjabat-penjabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pengertian Implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Dwijowijoto (2004:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasi dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik merupakan pelaksanaan fungsi pelayanan yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses untuk memberlakukan kebijakan baik berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah suatu Tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Implementasi di atas apabila dikaitkan dengan Kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan ini hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang, peraturan daerah, dan lain-lain. sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi adalah hal yang paling berat, karena disini masalah yang ada kadang tidak dijumpai didalam konsep, tetapi muncul di lapangan.

Menurut Dwijowijoto (2003:158) implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi Kebijakan Publik Merupakan Proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan (Tachjan, 2006:25).

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (van meter dan van horn, 2008 : 146).

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapainya atau tidaknya suatu tujuan yang ingin diraih.

4. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: a) komunikasi. Agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan harus tahu apa yang mereka harus kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi mesti ditransmisikan kepada personal yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi mesti secara akurat pula diterima oleh implementator; b) sumber daya. Sumber daya menjadi suatu faktor kritis didalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam menyesuaikan lainnya yang terlibat didalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) didalamnya atau harus memberikan pelayanan; c) disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga didalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan; d) struktur birokrasi. Para implementasi kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya,

namun mereka mungkin masih dicegah didalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka layani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah Prosedur Pengoperasian Standar dan Fragmentasi.

B. Kebijakan publik

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Lubis (2007:9) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengadilan kriminalitas dan pembangunan perkotaan (Dunn, 2003:20).

Menurut Anderson (2005:03) kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu.

Dye (2005:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan

walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain dan kebijakan adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan. Di dalam pilihan itu termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan itu semua tergantung manfaat dan kerugiannya.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah Kebijakan dari pemerintah sehingga salah satu ciri kebijakan “what government do or not to do” kebijakan dari pemerintah yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi (Abidin, 2012:07).

Kebijakan Publik Adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Dye, 2005:1).

Kebijakan adalah Suatu Tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang

untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Friderdrieh, 2007:9).

Dari uraian definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik pada umumnya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi lebih efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain tindakan, tindakan atau perbuatan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara, sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan publik tidak efektif.

3. Unsur-unsur kebijakan

Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang akan dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian, tujuan menjadi unsur pertama dari suatu kebijakan. Tetapi tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan itu, perbedaannya tidak hanya sekedar pada jangka waktu pencapaian tujuan yang dimaksud, tetapi juga pada posisi, gambaran, orientasi, dan dukungan.

Unsur kedua adalah Masalah. Masalah merupakan yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan jika pemecahannya dilakukan terhadap masalah yang tidak benar.

Unsur ketiga dari kebijakan adalah tuntutan (demand). tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal, bergantung pada urgensi dari tuntutan,gerahnya

masyarakat, dan sikap pemerintah dalam menanggapi tuntutan tersebut. Tuntutan tersebut muncul karena salah satu dari dua sebab yaitu karena terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan dan karena munculnya kebutuhan baru yang menyusul setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan.

Unsur keempat dari kebijakan adalah dampak (outcome) dampak ini merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan.

Unsur kelima dari kebijakan adalah sarana atau alat dari kebijakan (policy instruments).

4. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Dunn (2003:26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yakni: (1) Perumusan Masalah. Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui *penyusunan agenda (agenda setting)*. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosa penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. (2) Peramalan. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tahap ini disebut juga dengan tahap *formulasi kebijakan*.

Peramalan dapat menguji masa depan yang plausible, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau disusulkan mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan,

(3) Rekomendasi. Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasi melalui peramalan, ini membantu pengambil kebijakan pada tahap *adopsi* kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian mengenali eksternalisasi dan akibat ganda. Menentukan pertanggung jawaban administratif bagi implementasi kebijakan, (4) Pemantauan. Pemantauan (*monitoring*) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap *implementasi kebijakan*, (5) Evaluasi. Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan, jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap *penilaian kebijakan* terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

5. Faktor faktor penghambat dalam implementasi kebijakan

Keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik tergantung sejauh mana para aktor kebijakan memahami dan menerapkan analisis mereka. Karena pada dasarnya tidak ada satupun kebijakan yang dapat dikatakan berhasil seratus persen. Akan tetapi ada beberapa faktor yang perlu dibahas terkait hambatan implementasi kebijakan publik dan peluang-peluang keberhasilannya. diantaranya adalah : (a) Isi kebijakan Kegagalan implementasi disebabkan oleh semarnya isi dari kebijakan yaitu :Tujuan yang tidak cukup terperinci, Sarana-sarana dan penetapan prioritas yang tidak jelas (tidak ada), Program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada. (b) Kurang informasi, Kurang informasi mengakibatkan adanya gambaran yang kurang lengkap atau kurang tepat, baik mengenai pelaksanaan, isi kebijakan yang akan dilaksanakan hasil-hasil kebijakan. Struktur komunikasi antara organisasi pelaksana dan objek kebijakan. Objek kebijakan (kelompok sasaran) tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh pemerintah atau tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. (c) Dukungan, Dukungan yang kurang sebelum atau sesudah adanya implementasi kebijakan merupakan alah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa penolakan, ketidak setujuan, atau indikasi perlawanan dari beberapa pihak, baik itu parlemen legislatif selaku aktor pembuat kebijakan, atau masyarakat sebagai objek kebijakan yang umum lebih lanjut, berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan publik diantaranya adalah. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan, Kelemahan institusi, Ketidakmampuan sdm dalam

bidang teknis administrative, Kekurangan dalam bantuan teknis, Pengaturan waktu, Sistem informasi yang mendukung Perbedaan agenda tujuan antar aktor, Kurangnya desentralisasi dan partisipasi, Dukungan dan kesinambungan.

Implementasi seharusnya dianalisis dalam konteks “struktural institusional” yang tersusun dari serangkaian aktor dan organisasi. Program dapat dilihat sebagai suatu yang di implementasikan dalam kumpulan organisasi. Sebuah program akan melibatkan banyak organisasi lokal maupun organisasi nasional, organisasi swasta, organisasi bisnis dan organisasi buruh, program tidak dapat diimplementasikan oleh satu organisasi saja, tetapi harus melalui matrixatas serangkaian kumpulan organisasi.

6. Analisis kebijakan publik

Perbedaan analisis kebijakan dengan perumusan, implementasi dengan evaluasi kebijakan adalah analisa kebijakan merupakan kegiatan pokok dalam perumusan kebijakan karena ia memberikan pijakan awal mengapa sebuah kebijakan harus dibuat.

Perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditentukan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa analisis kebijakan publik adalah penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang

berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga mencari dan mengkaji berbagai alternatif memecahkan masalah atau pencapaian tujuan yang mana kegiatan ini memiliki sifat multidisiplin.

C. Pelayanan kesehatan

1. Pengertian pelayanan kesehatan

Menurut Pohan (2007:28) pelayanan kesehatan merupakan suatu alat organisasi untuk menjabarkan mutu layanan kesehatan kedalam terminologi operasional, sehingga semua orang yang terlibat dalam layanan kesehatan akan terikat dalam suatu sistem, baik pasien, penyedia layanan kesehatan, penunjang layanan kesehatan ataupun manajemen organisasi layanan kesehatan, dan akan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan perannya masing – masing.

Pelayanan Kesehatan Menurut Sutadi (2005:10) merupakan komoditi yang unik dan khusus, tidak dapat disamakan dengan komoditi lain karena pelayanan yang diberikan berupa jasa, sehingga sulit untuk mencapai kepuasan pelanggan. Dalam pengertian ini pelayanan kesehatan disamping sebagai suatu usaha untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, sekaligus juga dalam rangka usaha pembinaan, pengembangan, pemanfaatan sumberdaya manusia.

Menurut pendapat Azwar (1994) Pelayanan Kesehatan banyak macamnya namun jika disederhanakan secara umum dapat dibagi menjadi dua bentuk dan jenis yaitu: a. Pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi, tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan serta

sasaran utamanya untuk perseorangan dan keluarga. b. Pelayanan kesehatan masyarakat, ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif (memelihara, meningkatkan kesehatan) , preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitasi (pemulihan) kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat, lingkungan.

2. Pengertian Kesehatan

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 1992, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Menurut WHO (World Health Organization) atau Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan adalah keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan.

Menurut WHO, ada empat komponen penting yang merupakan satu kesatuan dalam definisi sehat yaitu: 1) sehat jasmani, merupakan komponen penting dalam arti sehat seutuhnya, berupa sosok manusia yang berpenampilan kulit bersih, mata bersinar, rambut tersisir rapi, berpakaian rapi, berotot, tidak gemuk, nafas tidak bau, selera makan baik, tidur nyenyak, gesit dan seluruh fungsi fisiologi tubuh berjalan normal. 2) sehat mental. Atribut seorang insan yang

memiliki mental yang sehat adalah sebagai berikut: a) selalu merasa puas dengan apa yang ada pada dirinya, tidak pernah meyesal dan kasian terhadap dirinya, selalu gembira, santai, dan menyenangkan serta tidak ada tanda-tanda konflik kejiwaan; b) dapat bergaul dengan baik dan dapat menerima kritik serta tidak mudah tersinggung dan marah, selalu perhatian dan toleransi terhadap kebutuhan emosi orang lain; c) dapat mengontrol diri dan tidak mudah emosi serta tidak mudah takut, cemburu, benci serta menghadapi dan dapat menyelesaikan masalah secara cerdas dan bijaksana. 3) kesejahteraan sosial. Batasan kesejahteraan sosial yang ada di setiap tempat atau negara sulit diukur dan sangat tergantung pada kultur, kebudayaan dan tingkat kemakmuran masyarakat setempat. Dalam arti yang lebih hakiki, kesejahteraan sosial adalah suasana kehidupan berupa perasaan aman damai dan sejahtera, cukup pangan, sandang dan papan. Dalam kehidupan masyarakat yang sejahtera, masyarakat hidup tertib dan selalu menghargai kepentingan orang lain serta masyarakat umum. 4) sehat spiritual. Spiritual merupakan komponen tambahan pada definisi sehat oleh WHO dan memiliki arti penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap individu perlu mendapat pendidikan formal maupun informal, kesempatan untuk berlibur, mendengar alunan lagu dan musik, siraman rohani seperti ceramah agama dan lainnya agar terjadi keseimbangan jiwa yang dinamis dan tidak monoton. Keempat komponen ini dikenal sebagai sehat positif atau disebut sebagai (*Positive Health*) karena lebih realistis dibandingkan dengan definisi WHO yang hanya bersifat idealistik semata-mata.

Dapat disimpulkan bahwa kesehatan adalah sejahteranya seseorang dari segi badan atau fisik, mental, dan sosial sehingga ia dapat hidup dengan sejahtera baik dilingkungan sosial maupun secara ekonomis.

D. Program Jaminan Kesehatan Nasional

Program jaminan kesehatan nasional disingkat JKN adalah suatu program pemerintah dan masyarakat/rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat di Indonesia agar penduduk di Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

Jaminan kesehatan nasional (JKN) atau jamkesmas merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (Mandatory) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang SJSN dengan tujuan memberikan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran yang dibayarkan oleh pemerintah.

Jaminan kesehatan nasional (JKN) yang telah dilaksanakan mulai tahun 2014 adalah upaya negara untuk menjamin hak setiap warga negara untuk dapat hidup sehat dan produktif. Peserta jaminan kesehatan mendapat jaminan kesehatan meliputi: fasilitas primer, sekunder maupun tersier baik milik pemerintah maupun milik swasta yang bekerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS). Menjamin kesehatan medis dari administratif pelayanan, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis seseorang sampai non medis

seperti akomodasi dan ambulan. Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif kemudian pelayanan transfusi darah sesuai keadaan medis.

Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dimana pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan, penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi dasar, keluarga berencana dan skrining kesehatan. Kemudian pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama dan pelayanan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan keluhan penyakit. Menjamin pelayanan kesehatan sebanyak lima anggota keluarga, termasuk pembayar iuran.

Jaminan kesehatan nasional mengacu pada prinsip-prinsip sistem jaminan sosial nasional (SJSN) berikut:

Prinsip kegotongroyongan, gotong royong sesungguhnya sudah menjadi salah satu prinsip dalam hidup bermasyarakat dan juga merupakan salah satu akar dalam kebudayaan kita. Dalam SJSN prinsip gotong royong berarti peserta yang membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu peserta yang sakit atau yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena peserta SJSN bersifat wajib untuk seluruh penduduk tanpa pandang bulu. Dengan demikian, melalui prinsip gotong royong jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip nirlaba, pengelolaan dana amanat oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) adalah nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented). Sebaliknya, tujuan utama adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya

kepentingan peserta. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil pengembangannya, akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

Prinsip portabilitas, prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia.

Prinsip kepesertaan bersifat wajib, kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat. Penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerjaan sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya SJSN dapat mencakup seluruh rakyat.

Prinsip dana amanat, dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial, dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

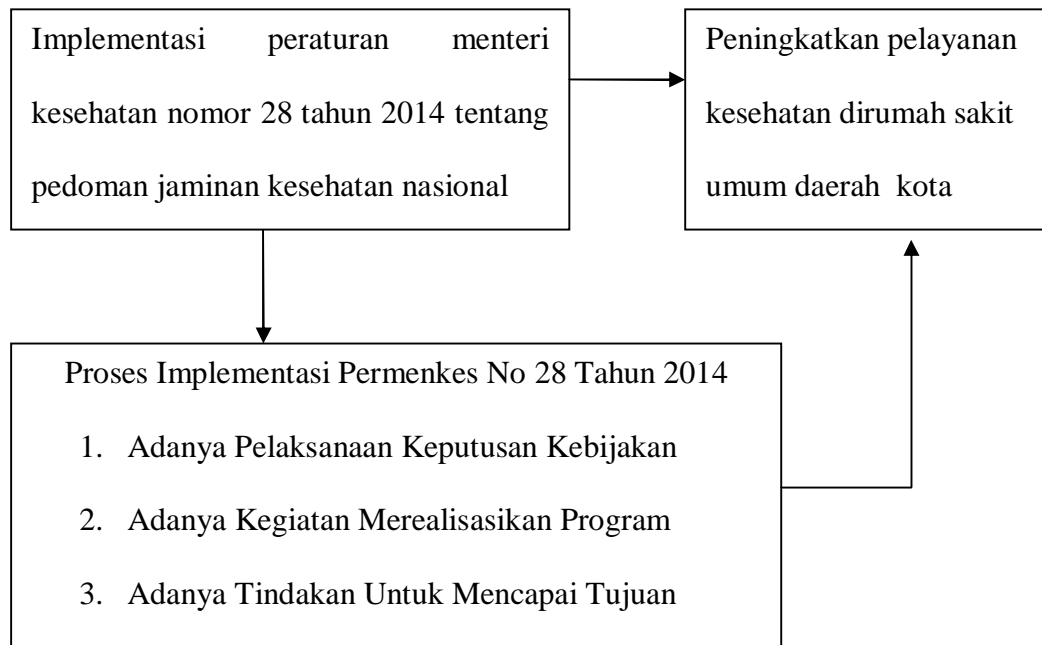
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu ucapan atau tulisan perilaku yang diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. Pendekatan yang dilakukan langsung keseluruhan subyek penelitian, tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, melainkan dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan.

Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah (natural) dan yang menjadi instrumen yaitu peneliti itu sendiri. Usaha pengumpulan data secara deskriptif dapat berbentuk laporan yang ditulis, data yang diperoleh dari penelitian berupa kata-kata, gambar.

B. Kerangka konsep

Konsep merupakan abstrak yang terbentuk oleh generasi dari hal-hal khusus oleh karena itu konsep merupakan abstrak merupakan konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur melalui variabel-variabel itu sendiri. Variabel dimana simbol atau garis yang menunjukkan nilai atau bilangan konsepnya. Seiring berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dalam rangka meningkatkan Pelayanan Kesehatan dalam memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintahan.

Gambar 3.1
Kerangka Konsep Peneliti



C. Defenisi Konsep

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah.

1. Implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya
2. Implementasi Kebijakan merupakan proses untuk memberlakukan kebijakan baik berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan,

sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapainya atau tidaknya suatu tujuan yang ingin diraih.

4. Kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain dan kebijakan adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan. Di dalam pilihan itu termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan itu semua tergantung manfaat dan kerugiannya
5. Kebijakan Publik pada umumnya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi lebih efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain tindakan, tindakan atau perbuatan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara, sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan publik tidak efektif.
6. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan memberikan pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif (memelihara, meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitasi (pemulihan) kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat, lingkungan.

7. Kesehatan adalah sejahteranya seseorang dari segi badan atau fisik, mental, dan sosial sehingga ia dapat hidup dengan sejahtera baik dilingkungan sosial maupun secara ekonomis
8. Jaminan Kesehatan Nasional adalah suatu program pemerintah dan masyarakat/rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat di Indonesia agar penduduk di Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

Tabel. 3.1
Kategorisasi Peneliti

NO	KONSEP TEORITIS	KATEGORISASI
1	Implementasi Permenkes Nomor 28 Tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan • Adanya kegiatan merealisasikan program • Adanya tindakan untuk mencapai tujuan
2	Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya yang diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan • Usaha untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat • Pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat

Sumber : Hasil Olahan 2018

E. Narasumber

Dalam penelitian ini narasumber adalah mereka yang di anggap cukup memahami tentang adanya implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini penentuan sumber informan dilakukan secara sengaja. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 7 orang yakni:

1. Bagian Tata Usaha RSUD Subulussalam : Siti Aflaida
2. Sub bagian program RSUD Subulussalam : Teuku Agung Purnama, Amd
3. Perawat RSUD Subulussalam : Butet Brutu S.kep. Ns
: Fitri yani S.kep. Ns
4. Masyarakat yang menggunakan JKN : Nur amrita
: Yuyun anggraini
: Basin Saraan

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang akan diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan cara wawancara.

Wawancara, dapat dilakukan secara:

- a. Terbuka, peneliti bertanya pada responden kunci tentang fakta-fakta sesuatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada.
- b. Terfokus.
- c. Terstruktur.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui referensi buku-buku, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan situs Internet yang dapat dipercaya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden dan tanggapan masing-masing responden penelitian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dengan penulis.

Data yang berasal dari wawancara, selanjutnya akan dilakukan analisis deskriptif untuk diinterpretasikan pada masing-masing jawaban yang diberikan oleh responden penelitian. Gambaran deskriptif dari karakteristik dan pilihan jawaban responden penelitian juga diukur dengan menentukan presentase dari masing-masing karakteristik dan jawaban serta data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Jaminan Kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam.

H. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, Jalan Subulussalam-Runding km.5 Dusun Rahmah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kondisi Kota Subulussalam

a. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Subulussalam yang memiliki luas daerah 1,391 KM2 berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara di Sebelah Utara, dan Kecamatan Trumon-Kabupaten Aceh Selatan di Sebelah Barat. Kecamatan Sultan Daulat merupakan Kecamatan terluas meliputi (43,28%) dari total luas Kota Subulussalam, diikuti Kecamatan Rundeng (23,88%), Kecamatan Simpang Kiri (15,31%), Kecamatan Longkib 10,85% dan Penanggalan (6,68%).

b. Jumlah penduduk

Banyaknya penduduk di kota subulussalam menurut data dalam angka adalah 73.708 jiwa dengan kepadatan penduduk tahun 2017 adalah 52 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017

kecamatan	luas		Penduduk(Orang)		Kepadatan penduduk (Orang/(Km2))
	Area		Population (Persons)		
Sub District	Km2	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Simpang Kiri	213	15,31	30.133	40,88	141
Penanggalan	93	6,69	12.544	17,02	134
Rundeng	320	23,01	12.015	16,30	37
Sultan Daulat	602	43,28	14.164	19,22	23
Longkib	163	11,72	4.852	6,58	29
Kota Subulussalam	1.391	100,00	73.708	100,00	52

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam

2. Gambaran Umum Tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam

Kehadiran RSUD Kota Subulussalam merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah kesehatan di Kota Subulussalam, yang sebagian besar dilakukan pada tahap kuratif (pengobatan). Hal ini dikarenakan RSUD Kota Subulussalam sebagai pelayanan kesehatan rujukan dari beberapa Puskesmas yang ada di Wilayah Kota Subulussalam. Dengan sarana dan prasarana yang ada dan tenaga kesehatan yang tersedia, RSUD Kota Subulussalam telah mampu menangani kasus – kasus kesehatan dengan segera, cepat dan seoptimal mungkin sebagaimana sesuai dengan klasifikasi RSUD Kota Subulussalam sebagai rumah sakit dengan tipe C. Penanganan kasus – kasus dan penyakit yang selama ini harus

dirujuk ke rumah sakit yang ada di Medan – Sumatera Utara kini sudah bisa dilakukan di RSUD Kota Subulussalam sesuai klasifikasi tersebut. Selain itu RSUD Kota Subulussalam juga berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Kota Subulussalam dan sekitarnya.

A. Sejarah Singkat RSUD Kota Subulussalam

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam pada awal diresmikannya adalah sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Subulussalam. Peresmian dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2011. Sedangkan untuk pembukaan kegiatan pelayanannya secara resmi dimulai pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam yang beralamat di Jalan Hamzah Fansyuri Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri pada saat terbentuk adalah rumah sakit dengan Tipe D sesuai Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam. Berjalan seiringnya waktu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam meningkatkan kelas pelayanannya menjadi rumah sakit Tipe C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/ I/ 0429/ 2015 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam tanggal 26 Februari 2015 dan dikeluarkannya Qanun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.

B. Tujuan RSUD Kota Subulussalam

1. Terbangunnya Sistem Manajemen yang Baik ;
 2. Tersedianya Kesempatan Pengembangan Karir bagi Setiap Pegawai yang Bekerja di RSUD Kota Subulussalam ;
 3. Tercapainya Pelayanan Prima yang Berkualitas diberikan oleh Setiap Komponen di RSUD Kota Subulussalam untuk Meningkatkan Kepuasan Masyarakat ;
- Tercapainya Rumah Sakit Terakreditasi dan Sistem Keuangan BLUD

C. Kedudukan Fungsi dan Tugas Pokok

Berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2015 RSUD Kota Subulussalam merupakan unsur pelaksana pemerintah, dipimpin oleh seorang Direktur eselon III.a yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota serta mempunyai tugas dalam perumusan kebijakan pelaksanaan upaya kesehatan di RSUD Kota Subulussalam secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan dan pencegahan penyakit serta melaksanakan pelayanan rujukan.

RSUD Kota Subulussalam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pelayanan kesehatan, medis dan asuhan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya RSUD Kota Subulussalam memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis dan non medis;
4. Penyelenggaraan asuhan keperawatan;
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
6. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kedokteran;
7. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
8. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Visi dan Misi

1) Visi RSUD Kota Subulussalam yaitu :

“PUSAT PELAYANAN KESEHATAN UNGGULAN YANG BERKUALITAS DAN ISLAMI “

Visi tersebut dapat menggambarkan fungsi RSUD Kota Subulussalam dalam rangka melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dengan mengutamakan layanan yang sesuai syariah sesuai dengan budaya masyarakat Aceh pada umumnya.

2) Misi RSUD Kota Subulussalam yaitu :

1. Memberikan Pelayanan yang terbaik, mudah, cepat dan tepat kepada masyarakat ;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit ;
3. Menjunjung Tinggi Profesionalisme Pelayanan melalui Pendekatan Keilmuan dan Spiritual ;
4. Mengikuti Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Keterampilan ;
5. Menjadi Rumah Sakit yang Terakreditasi dan Mandiri.

E. Motto

Motto RSUD Kota Subulussalam adalah: **“PELAYANAN KAMI ADALAH IBADAH, KESEMBUHAN ANDA ADALAH AMANAH”**

1. Budaya Kerja Staf RSUD Kota Subulussalam
 - a. Profesionalisme ;
 - b. Keadilan ;
 - c. Kerjasama ;
 - d. Kejujuran ;
 - e. Keterbukaan ;
 - f. Pelayanan pelanggan.

F. Struktur organisasi

G. Sarana dan Prasarana

RSUD Kota Subulussalam memiliki luas area 72.545 m² dan lahan yang telah digunakan hanya 80% untuk gedung dan fasilitas rumah sakit, sedangkan lahan kosong yang masih tersedia selanjutnya digunakan untuk pengembangan rumah sakit.

Sarana dan prasarana yang tersedia di RSUD Kota Subulussalam terdiri dari:

1. Pelayanan Rawat Jalan :

- § Poliklinik Interna ;
- § Poliklinik Bedah ;
- § Poliklinik Anak ;
- § Poliklinik Obstetri dan Ginekologi ;
- § Poliklinik Gigi

2. Pelayanan Tindakan Medik dan Rawat Inap/ Rawat Inap Intensif :

- § Instalasi Gawat Darurat (IGD) ;
- § Kamar Operasi (OK) ;
- § Rawat Inap Kelas 3 Interna ;
- § Rawat Inap Kelas 3 Bedah ;
- § Rawat Inap kelas 3 Anak ;
- § Rawat Inap Kelas 3 Kebidanan ;
- § Rawat Inap Kelas 2 ;
- § Rawat Inap Kelas 1 ;
- § Rawat Inap ICU dan NICU ;
- § Rawat Inap Perinatologi ;

3. Pelayanan Penunjang Medik :

- § Apotek ;
- § Laboratorium ;
- § Unit Transfusi Darah ;
- § Radiologi ;
- § Dapur Gizi ;
- § Fisioterapi ;

4. Pelayanan Manajemen/ Administrasi :

- § Rekam Medik ;
- § Administrasi Umum

Peralatan medis dan non medis yang tersedia di RSUD Kota Subulussalam sudah sesuai dengan Permenkes No 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

H. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Kepersertaan Rsud Kota Subulussalam Tahun 2017

Tabel 3.3
Kunjungan Berdasarkan Kepersertaan

NO	KUNJUNGAN	JENIS PELAYANAN		
		JKN /JKA	JAMKESMAS	LAINNYA
1	R. Jalan – PBJ	9.160	801	4.806
2	R. Jalan – R. Inap	2.269	287	2. 811
3	R. Jalan – Dirujuk	891	340	492
TOTAL		12.320	1.428	8.109

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018

I. Bidang Pelayanan Medis

1. IGD

Pelayanan yang dilakukan di Instalasi Gawat darurat terus ditingkatkan. Hal ini harus dilaksanakan sesuai dengan peningkatan kebutuhan dari pelayanan kesehatan. Rata-rata kunjungan dari pasien IGD perhari adalah 27 orang.

Tabel 3.4
Jumlah Kunjungan Pasien IGD Rsud Kota Subulussalam Tahun 2017

NO	BULAN	JUMLAH
1	JANUARI	457
2	FEBRUARI	388
3	MARET	411
4	APRIL	784
5	MEI	539
6	JUNI	539
7	JULI	622
8	AGUSTUS	666
9	SEPTEMBER	666
10	OKTOBER	608
11	NOVEMBER	596
12	DESEMBER	653
Jumlah		6.929

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018

2. Rawat Jalan

Pada tahun 2017 RSUD Kota Subulussalam telah memberikan pelayanan rawat jalan dengan 5 Poliklinik yaitu Gigi, Bedah, Kebidanan, Anak, dan Interna. Total jumlah kunjungan pasien rawat jalan pada tahun 2017 sebanyak 13.251 pasien dengan rata-rata kunjungan pasien rawat jalan perhari sebanyak 56 orang. Rata-rata kunjungan perhari untuk Poliklinik Internal adalah 21 orang, Poliklinik Bedah 12 orang, Poliklinik Anak 11 orang, Poliklinik Kebidanan 7 orang dan Poliklinik Gigi 5 orang.

3. Rawat Inap

Rawat inap merupakan proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu dimana pasien diinapkan disuatu ruangan RSUD jumlah tempat tidur sebanyak 132 tempat tidur. Jumlah pasien rawat inap tahun 2017 adalah orang 6.634.

4. Ruang Operasi

Ruang oprasi merupakan fasilitas serba modern yang dirancang sehingga dapat mengoptimalkan efisiensi dan memfasilitasi aliran oprasional tanpa hambatan. Pelayanan tindakan operasi di Ruang Operasi RSUD Kota Subulussalam pada tahun 2017 sebanyak 963 orang

5. Pelayanan Kebidanan

Pelayanan kebidanan merupakan pelayanan ataupun tindakan di ruang bersalin,yang berhubungan dengan kehamilan dan penyakit kandungan. Jumlah

kegiatan kebidanan pada 2017 yaitu Persalinan Normal 192, Persalinan Dengan Komplikasi 344 Abortus 92 dan Operasi 341.

6. Pelayanan Perinatologi

Pelayanan Perinatologi merupakan pelayanan ataupun tindakan di ruang perinatologi/neonatus, yang berhubungan dengan bayi yang baru lahir. Jumlah kunjungan di ruang perinatologi/neonatus tahun 2017 Yaitu Asfiksia 73, Trauma Kelahiran 59, BBLR 52, Kelainan Congenital 5, Ispa 13.

G. Bidang Pelayanan Penunjang Medis

1. Pelayanan Laboratorium

Laboratorium RSUD Kota Subulussalam beroperasi sejak tahun 2012 dan berjalan dengan baik. Beberapa pemeriksaan tertentu belum bisa dilakukan karena keterbatasan sarana alat kesehatan dan fasilitas.

Tabel 3.5
Pelayanan Laboratorium Berdasarkan Jenis Pemeriksaan Tahun 2017

NO	PEMERIKSAAN	JUMLAH
1	Hematologi	1400 Orang
2	Feases	1364 Orang
3	Elektrolit	1398 Orang
4	Malaria	1607 Orang
5	HCV	1453 Orang
6	HBSAg	1520 Orang
7	HIV	1567 Orang
8	Golongan Darah	1647 Orang
9	CT	1660 Orang
10	BT	1454 Orang
11	Urin Rutin	1922 Orang
12	Widal	2179 Orang
13	Dengue	1400 Orang
14		1364 Orang
Total		21935 Orang

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018

2. Unit Tranfusi Darah di Rumah Sakit (UTDRS)

Unit tranfusi darah dirumah sakit adalah unit yang menyediakan donor darah kepada pasien yang membutuhkan berdasarkan hasil dari intruksi dokter terkait. Kegiatan yang biasa dilaksanakan di UTDRS meliputi pemeriksaan golongan darah dan uji saring.

3. Pelayanan Farmasi

Instalasi Farmasi RSUD Kota Subulussalam memberikan pelayanan dengan menyediakan obat-obatan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap. Selain itu, instalasi farmasi juga berfungsi sebagai penyedia obat dan bahan habis pakai bagi unit-unit pelayanan. Berikut adalah jumlah obat yang tersedia di Apotek RSUD Kota Subulussalam berdasarkan golongan obat dan jumlah penulisan atau pelayanan resep.

Tabel 3.6

Jumlah Item Obat Yang Tersedia Di Apotek Rsud Kota Subulussalam Tahun 2017

NO	GOLONGAN OBAT	RAWAT JALAN	IGD	RAWAT INAP
1	Obat Generik	679.616	67.646	134.474
2	Obat Non Generik Formulatorium	677.148	39.945	145.541
3	Obat Non Generik	239.916	4.181	25.074
	TOTAL	1.596.680	111.772	305.084

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018

4. Radiologi

Radiologi merupakan ilmu Kedokteran yang menggunakan radiasi untuk mendiagnosis dan pengobatan penyakit. Radiasi dimanfaatkan untuk terapi atau studi pencitraan. RSUD Kota Subulussalam telah menyediakan pelayanan radiologi yang mampu memberikan beberapa pelayanan radiodiagnostik.

5. Pelayanan Penunjang Medis Lain

Pelayanan Penunjang Non Medik Seperti Instalasi Gizi sudah mampu memberikan layanan gizi pasien. Sedangkan untuk instalasi lain seperti IPSRS, Laundry, CSSD, Pemulasaran Jenazah dan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit di RSUD Kota Subulussalam belum dapat memberikan pelayanan secara maksimal karena keterbatasan sarana, prasarana dan juga sumber daya manusianya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan kualitatif yaitu : data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 4 orang pegawai RSUD Kota Subulussalam yaitu : Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Program, Perawat dan 3 orang masyarakat yang pernah mendapat pelayanan di RSUD Kota Subulussalam.

B. Hasil Penelitian

1. Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber Ibu Siti Aflaida selaku bagian tata usaha RSUD Kota Subulussalam yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2018 memberi tanggapan atas pertanyaan adanya pelaksanaan keputusan kebijakan di RSUD Yaitu pelaksanaan kebijakan yang diterapkan dilaksanakan secara efisien dari menegerial dan seluruh staff RSUD sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan keputusan yang diambil dalam meningkatkan pelayanan kesehatan harus memahami tata cara serta memahami kebutuhan para pasien dan seluruh staff harus memenuhi standar untuk melaksakan kebijakan yang harus diterapkan baik itu kebijakan pemerintah ataupun kebijakan rumah sakit yang semata-mata kebijakan itu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pasien.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan yaitu adanya program-program sebagai faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas dan mutu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Teuku Agung Purnama selaku sub bagian pogram di RSUD Kota Subulussalam yang dilakukan pada tanggal 15 february 2018 mengenai pelaksanaan keputusan kebijakan haruslah ada program –program dalam pengembangan pembangunan RSUD dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang bertujuan memenuhi atau melaksakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah maupun kebijakan dari rumah sakit. Keputusan yang diambil dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yaitu seluruh pegawai harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan seperti, para pegawai harus memiliki STR (surat tanda registasi) dan memberikan pelayanan yang merata demi mencapai kebijakan yang sudah ditetapkan. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan yaitu adanya pencapaian yang dilakukan seperti program-program dan adanya kerja sama antara masyarakat, pemerintah daerah dan para pegawai untuk melaksanakan kebijakan yang ada.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Butet Berutu selaku perawat di RSUD Kota Subulussalam pada tanggal 15 february 2018 yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dengan mengadakan program-program yang bertujuan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan dari RSUD Kota subulussalam. Keputusan yang diambil dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yaitu melakukan update alat kesehatan dan data seluruh pegawai RSUD sesuai dengan standart kemenkes dan faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan yaitu kemauan seluruh pegawai RSUD

untuk meningkatkan kebijakan yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada ibu Fitri Yani S.Kep Ns selaku perawat RSUD Kota Subulussalam yang dilaksanakan pada tanggal 15 febuari 2018 mengenai bagaimana pelaksanaan keputusan kebijakan yang dilakukan di RSUD Yaitu mengadakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD kota subulussalam. Keputusan yang diambil dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yaitu membuat penambahan alat kesehatan dan dokter spesialis dan faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan dirumah sakit yaitu seluruh masyarakat harus mematuhi peraturan rumah sakit dan para pegawai harus bekerja sesuai dengan ketentuan dan tugas yang sudah ditentukan bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan.

Menurut ibu Nur Amrita S.Pd selaku masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan dari rumah sakit dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018 mengenai kebijakan yang dilaksanakan di rumah sakit yaitu adanya program jaminan kesehatan, dari pemerintah untuk kesehatan masyarakat dan kebijakan tersebut untuk memberi keringanan terhadap masyarakat baik yang mampu maupun yang kurang mampu, kebijakannya dilakukan sesuai tingkatan yang diterima masyarakat dan rumah sakit sudah melakukan kebijakan dengan benar hanya saja masih harus memperbaiki kendala yang sulit diterima masyarakat.

Menurut ibu Yuyun Anggraini selaku masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam dalam

wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 februari 2018 mengenai kebijakan yang dilaksanakan di RSUD yaitu kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan yang dimiliki masyarakat dan sesuai prosedur yang dibuat dan kebijakan tersebut sudah dilakukan dengan benar dan sudah dirasakan oleh sebagian masyarakat.

Menurut Bapak Basim Saran selaku masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD kota Subulussalam dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 februari 2018 mengenai kebijakan yang dilaksanakan di rumah sakit yaitu kebijakan dari pemerintah untuk masyarakat seperti JKN dan BPJS untuk memelihara dan menjaga serta mengobati masyarakat yang membutuhkannya. Pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dari kebijakan pemerintah tersebut dan kebijakan itu dilakukan dengan benar oleh pihak rumah sakit namun masih terdapat kendala dalam menerima pelayanan kesehatan dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa tujuan yang dicapai dalam Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan sudah tercapai. Bahwasannya kebijakan yang dibuat sudah terlaksanakan dan juga diterima oleh masyarakat. Pihak Rumah sakit umum daerah kota subulussalam melaksakan kebijakan tersebut untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat banyak proses yang dilakukan untuk pencapaian kebijakan dan masyarakat juga banyak yang menggunakan kebijakan jaminan kesehatan sesuai dengan tingkatannya.

2. Adanya program yang akan dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber Ibu Siti Aflaida selaku bagian tata usaha RSUD Kota Subulussalam yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2018 memberi tanggapan atas pertanyaan program yang ada di RSUD Kota Subulussalam yaitu program Bidang Medis seperti Peningkatan mutu SDM jajaran medis dan paramedis, Peningkatan pelayanan medis spesialis dasar dan pelayanan medis spesialis penunjang, Menyelenggarakan fungsi pelayanan operatif dan pelayanan intensif, Pembangunan Sarana dan prasarana medis, pengadaan alat kesehatan pada setiap unit pelayanan dan program Bidang Non Medis seperti Peningkatan mutu SDM jajaran non medis Investasi alat-alat non medis Pemeliharaan & perbaikan sarana, prasarana dan peralatan. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang medis. Tujuan program yang dilakukan yaitu meningkatkan fasilitas rumah sakit dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program ini yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dirumah sakit

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Teuku Agung Purnama selaku sub bagian pogram di RSUD Kota Subulussalam yang dilakukan pada tanggal 15 february 2018 mengenai program yang ada di RSUD Kota Subulussalam yaitu program Bidang Medis seperti Peningkatan mutu SDM jajaran medis dan paramedis, Peningkatan pelayanan medis spesialis dasar dan pelayanan medis spesialis penunjang, Menyelenggarakan fungsi pelayanan operatif dan pelayanan intensif, Pembangunan Sarana dan prasarana medis, pengadaan alat

kesehatan pada setiap unit pelayanan dan program Bidang Non Medis seperti Peningkatan mutu SDM jajaran non medis Investasi alat-alat non medis Pemeliharaan & perbaikan sarana, prasarana dan peralatan. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang medis. Tujuan program di RSUD yaitu untuk meningkatkan serta melengkapi fasilitas dan memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap terhadap masyarakat tanpa harus dirujuk di kota lain. Kendala yang dihadapi yaitu proses pembangunan yang lama dan kurangnya pengetahuan masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada ibu Butet Berutu selaku perawat di RSUD Kota Subulussalam pada tanggal 15 februari 2018 tentang program yang ada di rumah sakit yaitu program medis dan non medis seperti penambahan dokter spesialis, pembangunan dan penambahan alat kesehatan yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan kendala yang dihadapi yaitu masih ada masyarakat yang kurang pengetahuan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada ibu Fitri Yani S.Kep Ns selaku perawat RSUD Kota Subulussalam yang dilaksanakan pada tanggal 15 febuari 2018 mengenai program yang ada di rumah sakit yaitu program medis dan non medis program medis dan non medis seperti Penambahan fasilitas kesehatan penambahan alat kesehatan yang belum ada, dan penambahan dokter spesialis yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu kurangnya masyarakat mengikuti prosedur.

Menurut ibu Nur Amrita S.Pd selaku masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan dari rumah sakit dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018 mengenai program tujuan dari program yang ada di RSUD Kota Subulussalam sebagian sudah tercapai. Lebih kurang masyarakat sudah merasakan tujuan dari program – program yang dilaksanakan melayani kesehatan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan seperti mulai lengkapnya dokter spesialis dan kendala yang dihadapi hanya kurangnya pengetahuan masyarakat mengikuti prosedur dirumah sakit.

Menurut ibu Yuyun Anggraini selaku masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 february 2018 mengenai program di RSUD sangat banyak bahkan sampai tidak diketahui masyarakat tapi tujuan dari program tersebut untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan kendala yang dihadapi kurang mengertinya sebagian masyarakat terhadap program rumah sakit.

Menurut bapak Basim Saran selaku masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Kota Subulussalam yaitu mengenai program program rumah sakit yang sudah dijalankan dan juga sudah dirasakan bahkan digunakan masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit tetapi kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sosialisasi dari program rumah sakit kepada masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan Rumah sakit sudah tercapai karna program yang ada sudah dirasakan masyarakat hanya saja program rumah sakit belum di sosialisasikan prosedurnya kepada masyarakat.

3. Adanya tindakan untuk mencapai tujuan

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber Ibu Siti Aflaida selaku bagian tata usaha RSUD Kota Subulussalam yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2018 memberi tanggapan atas pertanyaan usaha yang dilakukan RSUD dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yaitu dengan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dari berbagai disiplin ilmu agar dapat memberikan pelayanan secara cepat, tepat, akurat dan bermutu, oleh karena itu perlu adanya konsep pengembangan sumber daya manusia dengan pendidikan dan pelatihan agar tercipta suatu pelayanan yang profesional. Tugas yang dilakukan rumah sakit yaitu memberikan pelayanan yang bermutu kepada semua pasien dan kendala yang dihadapi yaitu kurangnya dokter spesialis.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Teuku Agung Purnama selaku sub bagian program di RSUD Kota Subulussalam yang dilakukan pada tanggal 15 februari 2018 mengenai usaha yang dilakukan RSUD Kota Subulussalam Dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yaitu dengan mengadakan pelatihan, memberikan informasi dan tugas yang dilakukan yaitu memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat tetapi kendala yang dihadapi awamnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan masih kurangnya dokter spesialis dan sumber daya manusia lainnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada ibu Butet Berutu selaku perawat di RSUD Kota Subulussalam pada tanggal 15 februari 2018 tentang usaha yang dilakukan rumah sakit dalam mencapai tujuan yaitu dengan adanya pembangunan beserta banyaknya penambahan alat kesehatan yang belum ada

sebelumnya sekarang sudah ada dan adanya pelatihan terhadap para pegawai. tugas yang dilakukan yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat untuk kendala mungkin tidak ada kendala yang dihadapi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada ibu Fitri Yani S.Kep Ns selaku perawat RSUD Kota Subulussalam yang dilaksanakan pada tanggal 15 febuari 2018 mengenai usaha yang dilakukan rumah sakit untuk mencapai tujuan yaitu dengan memberikan informasi yang akurat tentang kesehatan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan standar oprasional pegawai (SOP) dan kendala yang dihadapi pihak rumah sakit yaitu awamnya pengetahuan masyarakat tetang kesehatan.

Menurut ibu Nur Amrita S.Pd selaku masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan dari rumah sakit dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018 mengenai usaha yang dilakukan rumah sakit dalam mencapai tujuan yaitu dengan melakukan tugas-tugas mereka dengan baik dan sesuai dengan kemampuannya yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebaik mungkin sedangkan kendalanya kurang dokter spesialis dan prosedurnya terlalu sulit dalam melakukan proses administrasi kesehatan.

Menurut ibu Yuyun Anggraini selaku masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 febuari 2018 mengenai usaha yang dilakukan rumah sakit dalam mencapai tujuan yaitu dengan memberi pelayanan kepada masyarakat baik ittu memelihara dan mengobati pasien dan tugas rumah

sakit memberikan pelayanan sebaik mungkin. Kendala yang dihadapi rumah sakit yaitu proses administrasi rumah sakit terlalu lambat.

Menurut bapak Basim Sarana selaku masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD kota subulussalam yaitu mengenai usaha yang dilakukan RSUD yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bertujuan memberikan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat sedangkan kendala yang di hadapi yaitu kurangnya dokter spesialis.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tindakan untuk mencapai tujuan sudah berhasil karena banyak masyarakat sudah merasakan tujuan yang ingin dicapai hanya saja pihak rumah sakit membutuhkan dokter spesialis agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Upaya yang diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber Ibu Siti Aflaida selaku bagian tata usaha RSUD Kota Subulussalam yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2018 memberi tanggapan menjaga kualitas dan mutu pelayanan serta sarana prasarana atas pertanyaan upaya yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yaitu dengan Mengutamakan kepuasan pasien, Menerapkan pola tarif berbasis unit cost dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, Mempercepat prosedur pelayanan administrasi pasien, Memperluas hubungan kemitraan dengan perusahaan asuransi kesehatan, Meningkatkan pelayanan dan komunikasi dengan pasien hasilnya sangat baik untuk

meningkatkan kesehatan tetapi dibutuhkan kerjasama masyarakat dan pihak rumah sakit untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Teuku Agung Purnama selaku sub bagian pogram di RSUD Kota Subulussalam yang dilakukan pada tanggal 15 february 2018 mengenai upaya yang dilakukan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan yaitu Menerapkan pola tarif berbasis unit cost dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, Mempercepat prosedur pelayanan administrasi pasien, Memperluas hubungan kemitraan dengan perusahaan asuransi kesehatan, Meningkatkan pelayanan dan komunikasi dengan pasien. Hasilnya baik dan berdampak positif bagi RSUD maupun masyarakat yang melaksanakan yaitu seluruh pegawai RSUD.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada ibu Butet Berutu S.Kep Ns selaku perawat di RSUD Kota Subulussalam pada tanggal 15 february 2018 tentang usaha yang dilakukan rumah sakit dalam upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan menjaga kualitas dan mutu pelayanan serta sarana prasarana yang hasilnya akan sangat baik bagi rumah sakit dan masyarakat. Yang melaksakan upaya dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan yaitu pegawai rumah sakit dan masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada ibu Fitri Yani S.Kep Ns selaku perawat RSUD Kota Subulussalam yang dilaksanakan pada tanggal 15 february 2018 mengenai upaya yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yaitu adanya pantauan terhadap pelayanan RSUD maka

hasilnya akan baik dan sesuai dengan ketentuan yang melaksanakannya yaitu seluruh masyarakat dan pegawai RSUD.

Menurut ibu Nur Amrita S.Pd selaku masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan dari rumah sakit dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018 mengenai upaya yang diselenggarakan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan yaitu memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik kepada masyarakat yang hasilnya akan baik terhadap masyarakat yang menerimanya. Pelaksanaanya dilakukan oleh seluruh pihak rumah rumah sakit.

Menurut ibu Yuyun Anggraini selaku masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD kota subulussalam dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 february 2018 mengenai usaha yang dilakukan rumah sakit dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan yaitu memberikan pelayanan dan obat obatan yang baik keada masyarakat maka hasilnya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan yang melaksanakannya adalah pemerintah dan pegawai rumah sakit.

Menurut bapak Basim Saran selaku masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD kota subulussalam dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 februar 2018 yaitu mengenai upaya yang dilakukan RSUD untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yaitu memberikan pelayanan dan obat yang kepada masyarakat yang hasilnya akan menyembuhkan masyarakat kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah masyarakat serta pegawai RSUD Kota Subulussalam

Berdasarkan wawancara yang dilakukan mengenai upaya yang dilakukan pemerintah dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka hasilnya akan berdampak baik kepada masyarakat.

5. Usaha untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber Ibu Siti Aflaida selaku bagian tata usaha RSUD Kota Subulussalam yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2018 memberi tanggapan bahwa dengan melakukan penyuluhan seputar tentang kesehatan kepada masyarakat dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat karena kondisi masyarakat sebagian sudah sejahtera dan sebagian lagi belum dan yang kita semua memiliki hak untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat karena hidup ini harus saling tolong menolong dalam kehidupan karena setiap orang memiliki hak masing-masing.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Teuku Agung Purnama selaku sub bagian program di RSUD Kota Subulussalam yang dilakukan pada tanggal 15 februari 2018 memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraannya dan kondisi masyarakat masih banyak yang belum sejahtera dan yang memperbaikinya haruslah dari masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada ibu Butet Berutu selaku perawat di RSUD Kota Subulussalam pada tanggal 15 februari 2018 tentang usaha yang dilakukan memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat tentang kesehatan kondisi

masyarakat sebagian sudah sejahtera dan yang berhak memperbaiki kesejahteraan masyarakat yaitu dari pemerintah dan masyarakat sendiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada ibu Fitri Yani S.Kep Ns selaku perawat RSUD Kota Subulussalam yang dilaksanakan pada tanggal 15 febuari 2018 mengenai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan informasi dan pelayanan untuk masyarakat, kondisi masyarakat masih belum sejahtera dan yang berhak memperbaikinya kita semua.

Menurut ibu Nur Amrita S.Pd selaku masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan dari rumah sakit dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018 mengenai upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat yaitu menjaga dan meningkatkan kesehatan sendiri karena kondisi masyarakat masih banyak yang belum sejahtera dan yang berhak memperbaiki kesejahteraan masyarakat yaitu dari masyarakat dan pegawai RSUD dan pemerintah.

Menurut ibu Yuyun Anggraini selaku masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 februari 2018 mengenai usaha yang dilakukan dalam kesejahteraan masyarakat yaitu dengan meningkatkan kesehatan dan meningkatkan perekonomian karena sebagian dari masyarakat masih belum sejahtera dan yang berhak memperbaiki kesejahteraan yaitu dari diri sendiri.

Menurut bapak Basim Saraan selaku masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Kota Subulussalam dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 februar 2018 yaitu usaha yang dilakukan dalam

kesejahteraan masyarakat yaitu dengan meningkatkan kesehatan dan meningkatkan perekonomian karena sebagian dari masyarakat masih belum sejahtera dan yang berhak memperbaiki kesejahteraan yaitu dari diri sendiri.

Kesimpulan Dari wawancara mengenai usaha untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat yaitu meningkatkan kesehatan dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dari diri sendiri.

6. Pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber Ibu Siti Aflaida selaku bagian tata usaha RSUD Kota Subulussalam yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2018 memberi tanggapan bahwa pelayanan kedokteran dan kesehatan masyarakat sudah meningkat yang berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dan sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Teuku Agung Purnama selaku sub bagian pogram di RSUD Kota Subulussalam yang dilakukan pada tanggal 15 februari 2018 memberikan tanggapan bagaimana pelayanan kedokteran dan kesehatan masyarakat sudah meningkat dan usaha yang dilakukan dengan memberikan informasi yang akurat pelayanan kedokteran dan kesehatan sudah sesuai dengan yang diharapkan hanya saja kurang dokter spesialis

Menurut ibu yuyun angraini selaku masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 februari 2018 mengenai pelayanan kedokteran dan kesehatan masyarakat di RSUD sudah baik hanya saja adanya

perbedaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan kelas tingkatan dan usaha yang dilakukan memberikan pelayanannya kepada masyarakat.

Menurut bapak Basim Sarasin selaku masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Kota Subulussalam dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 februar 2018 mengenai pelayanan kedokteran dan kesehatan masyarakat di RSUD sudah baik hanya saja adanya perbedaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan kelas tingkatan dan usaha yang dilakukan memberikan pelayanannya yang baik.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat sudah membaik hanya saja masih ada pegawai yang tidak terlalu baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

C. Pembahasan

1. Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dirumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, pelaksanaan keputusan kebijakan di RSUD Kota Subulussalam berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diinginkan yaitu pihak RSUD memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan jaminan kesehatan maupun kebijakan kebijakan yang dibuat pemerintah lainnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Van Mater dan Van Hom (2003 : 139) Merumuskan Proses Implementasi sebagai Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/penjabat-penjabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Oleh karena itu pihak RSUD Kota Subulussalam membuat pencapaian progra-program untuk membuat mencapai tujuan dalam memberikan pelayanan keehatan kepada masyarakat.

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan sudah tercapai. Bahwasannya kebijakan yang dibuat sudah terlaksanakan dan juga diterima oleh masyarakat. Pihak Rumah sakit umum daerah kota subulussalam melaksakan kebijakan tersebut untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat banyak proses yang dilakukan untuk pecapaian kebijakan dan masyarakat juga banyak yang menggunakan kebijakan jaminan kesehatan sesuai dengan tingkatannya.

2. Adanya program yang akan dilaksanakan

Adanya program yang dijalankan oleh RSUD Kota Subulussalam maka segala bentuk rencana akan lebih mudah terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan dan yang harus dipenuhi dalam proses implementasi yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut akan menerima manfaat dari program yang dijalankan serta terjadinya perubahan dan peningkatan dalam kehidupan, tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa program tersebut gagal dilaksanakan.

Sesuai dengan pendapat Tangkilisan (2003:29) bahwa implementasi adalah kegiatan merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Adapun program yang akan dicapai yaitu program Bidang Medis seperti Peningkatan mutu SDM jajaran medis dan paramedis, Peningkatan pelayanan medis spesialis dasar dan pelayanan medis spesialis penunjang, Menyelenggarakan fungsi pelayanan operatif dan pelayanan intensif, Pembangunan Sarana dan prasarana medis, pengadaan alat kesehatan pada setiap unit pelayanan dan program Bidang Non Medis seperti Peningkatan mutu SDM jajaran non medis Investasi alat-alat non medis Pemeliharaan & perbaikan sarana, prasarana dan peralatan. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang medis.

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dapat disimpulkan bahwa Rumah sakit sudah tercapai karna program yang ada sudah dirasakan masyarakat.

3. Adanya tindakan untuk mencapai tujuan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam bahwa tindakan

dari RSUD sudah dilakukan untuk mencapai tujuan memberi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pegawai RSUD kepada masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Dwijiwijoto (2004:158) bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya yaitu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang.

Oleh karena itu pihak RSUD memiliki tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan kualitas dan mutu yang dimiliki dan akan diberikan kepada masyarakat

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dapat disimpulkan bahwa tindakan untuk mencapai tujuan sudah berhasil karena banyak masyarakat sudah merasakan tujuan yang ingin dicapai hanya saja pihak rumah sakit membutuhkan dokter spesialis agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Upaya yang diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam bahwa upaya yang diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sudah dilaksanakan dengan baik seperti menjaga kualitas dan mutu pelayanan serta sarana prasarana atas pertanyaan upaya yang dilakukan untuk memelihara dan dan meningkatkan

kesehatan yaitu dengan Mengutamakan kepuasan pasien, Menerapkan pola tarif berbasis unit cost dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, Mempercepat prosedur pelayanan administrasi pasien, Memperluas hubungan kemitraan dengan perusahaan asuransi kesehatan, Meningkatkan pelayanan dan komunikasi dengan pasien.

Sesuai dengan pendapat Pohan (2007:28) bahwa pelayanan kesehatan merupakan suatu organisasi untuk menjabarkan mutu layanan kesehatan kedalam terminologi oprasional, sehingga semua orang yang terlibat dalam layanan kesehatan akan terikat dalam suatu sistem, baik pasien, penyedia layanan kesehatan, penunjang layanan kesehatan ataupun manajemen organisasi layanan kesehatan dan akan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan perannya masing-masing.

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dapat disimpulkan bahwa dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka hasilnya akan berdampak baik kepada masyarakat.

5. Usaha untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dalam usaha

memperbaiki kesejahteraan masyarakat yaitu pihak RSUD memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkannya karena kesehatan merupakan bentuk dari kesejahteraan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sutadi (2005:10) bahwa pelayanan kesehatan merupakan usaha untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, sekaligus juga dalam rangka usaha pembinaan, pengembangan, pemanfaatan sumberdaya manusia.

Oleh karena itu pihak RSUD meningkatkan pelayanan kesehatan, alat kesehatan serta fasilitas kesehatan lainnya semata hanya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dapat disimpulkan bahwa tindakan untuk mencapai usaha untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat yaitu meningkatkan kesehatan dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dari diri sendiri.

6. Pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota pada pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat sudah baik karena pihak RSUD memberikan pelayanan kedokteran dan kesehatan masyarakat kepada para pasien di RSUD.

Hal ini sesuai dengan pendapat Azwar (1994) yaitu pelayanan kesehatan banyak macamnya namun dapat disederhanakan secara umum dibagi menjadi dua bentuk yaitu: pelayanan kedokteran yang tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan serta sasaran utamanya untuk perseorangan dan keluarga dan pelayanan kesehatan masyarakat yang tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit yang sasaran utamanya masyarakat dan kelompok.

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat sudah membaik hanya saja masih ada pegawai yang tidak terlalu baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan keputusan kebijakan di RSUD Kota Subulussalam berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diinginkan yaitu pihak RSUD memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan jaminan kesehatan maupun Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah lainnya.
2. Ada pun program yang terlaksanakan yaitu program Bidang Medis seperti Peningkatan mutu SDM jajaran medis dan pramedis, Peningkatan pelayanan medis spesialis dasar dan pelayanan medis spesialis penunjang, Menyelenggarakan fungsi pelayanan operatif dan pelayanan intensif, Pembangunan Sarana dan prasarana medis, pengadaan alat kesehatan pada setiap unit pelayanan dan program Bidang Non Medis seperti Peningkatan mutu SDM jajaran non medis Investasi alat-alat non medis Pemeliharaan & perbaikan sarana, prasarana dan peralatan. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang medis.
3. Tujuan yang dicapai belum berjalan baik karena pihak rumah sakit kekurangan sumber daya manusia seperti kurangnya dokter spesialis karena banyak masyarakat membutuhkan dokter spesialis. Hal-hal

yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah dalam hal mengenai pelayanan kesehatan yaitu menambahkan dokter spesialis dan mempercepat penambahan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.

4. Upaya yang diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sudah dilaksanakan dengan baik seperti menjaga kualitas dan mutu pelayanan serta sarana prasarana atas pertanyaan upaya yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yaitu dengan Mengutamakan kepuasan pasien, Menerapkan pola tarif berbasis unit cost dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, Mempercepat prosedur pelayanan administrasi pasien, Memperluas hubungan kemitraan dengan perusahaan asuransi kesehatan, Meningkatkan pelayanan dan komunikasi dengan pasien.
5. Usaha untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat memperbaiki kesejahteraan masyarakat yaitu pihak RSUD memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkannya karena kesehatan merupakan bentuk dari kesejahteraan
6. Pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Kota Subulussalam sudah baik karena pihak RSUD memberikan pelayanan kedokteran dan kesehatan masyarakat kepada para pasien di RSUD

B. SARAN

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan
2. Adanya program yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan yang tujuan utamanya meningkatkan pelayanan kesehatan
3. Adanya tindakan untuk mencapai tujuan sudah terimplementasikan dengan baik, akan tetapi harus lebih ditingkatkan usaha serta menjalankan tugasnya memberikan pelayanan
4. Upaya yang diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan harus lebih ditingkatkan agar pelayanan kesehatan yang diberikan menjadi baik
5. Usaha untuk mensejahterakan rakyat di tingkatkan agar masyarakat mendapatkan kesejahteraannya
6. Pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat harus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2008, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abidin, 2012, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Suara Bebas.
- Anderson Dan Subarsono. 2005, *Kebijakan Dan Kebijakan Publik*, Bandung
- Azwar, Azrul, 1994. *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Bina Rupa Askara Tangerang.
- Dunn, Wiliam N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gajah Mada University Press, Jakarta.
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta, Elexmedia Komputindo.
- Friedrich, 2007, *Kebijakan Publik*, Maju Mundur, Bandung.
- Lubis, Solly M. 2007, *Kebijakan Publik*. Bandung, Mandar Maju
- Meter, Van Et, Al. 2003. *The Policy Implementation Process-Aconceptual Framework*.
- Mustopadidjaja. A.R 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kerja*. LAN. Jakarta.
- Pohan, I.S. 2007. *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan : Dasar – Dasar Pengertian Dan Penerapan*. EGC. Jakarta.
- Subagyo, Joko P, 2004, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutadi,Idup Dan Fernando. 2005, *Dasar-Dasar Good Governance*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Tingkilisan, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Lukman Dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik.
- Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung
- Thomas, R. Dye, 2005, *Kebijakan Dan Kebijakan Publik*, Rosdakarya, Bandung
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik Dan Implementasi Kebijakan*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- , 2002, *Teori Dan Proses Kebijakan*, Media Pressindo, Yogyakarta

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan

Internet

<http://pengetahuanumum.net/indonesia/pemerintahan/jaminan-kesehatan-nasional-jkn-/.dinkes> pada 31 mei 2014).

<http://pengetahuanumum.net/indonesia/pemerintahan/jaminan-kesehatan-nasional-jkn-/.dinkes> pada 31 mei 2014).

<https://dedyamanta.wordpress.com/2013/04/29/kesehatan-merupakan-hak-asasi-manusia/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sunly
Umur : 21 tahun
Tempat/tanggal.lahir : Subulussalam, 19 april 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia
Anak ke : 4 dari 7 bersaudara
Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Kota Subulussalam
Nama orang tua
Ayah : Sahril Berutu
Ibu : Erawati

PENDIDIKAN

1. Tamat SD Negeri 06 Kota Subulussalam Tahun 2008, Berijazah
2. Tamat SMP Muhammadiyah Kota Subulussalam Tahun 2011, Berijazah
3. Tamat SMA Negeri 01 Simpang Kiri Tahun 2014, Berijazah
4. Terdaftar sebagai mahasiswa FISIP UMSU program studi ilmu administrasi negara konsentrasi kebijakan publik tahun 2014

Dengan demikian riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan,
Yang menyatakan,

Sunly

Pedoman Wawancara

**Judul : Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan
Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam**

Nama : Siti Aflaida, Amd.Keb
Lama bekerja : 3 tahun
Usia : 43 tahun
Pendidikan terakhir : D3 Kebidanan
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
Jenis kelamin : Perempuan

1. Adanya Pelaksanaan Keputusan Kebijakan

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab: untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD dibutuhkan kebijakan yang efisien dari managerial dan seluruh staf RSUD untuk lebih memahami tata cara dan kebutuhan pasien.

- b. Menurut bapak/ibu apa saja keputusan yang diambil dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : seluruh staf RSUD harus memenuhi standart

- c. Menurut bapak/ibu apa faktor pendukung pelaksanaan kebijakan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : adanya program-program pendukung untuk peningkatan kualitas dan Mutu RSUD

2. Adanya Program Yang Akan Dilaksanakan

- a. Menurut bapak/ibu apa saja program yang ada di RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ?

Jawab : adanya program medis dan non medis

- b. Menurut bapak/ibu apa tujuan program yang dilakukan di RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ?

Jawab: untuk meningkatkan fasilitas rumah sakit dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

- c. Menurut bapak/ibu kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan program yang dijalankan RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ?

Jawab : Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan rumah sakit

3. Adanya Tindakan Untuk Mencapai Tujuan

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana usaha yang dilakukan di RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ?

Jawab : meningkatkan SDM yang profesional

- b. Menurut bapak/ibu tugas apa sajakah yang dilakukan RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ?

Jawab : pendidikan dan pelatihan kepada pegawai

- c. Menurut bapak/ibu kendala apa yang dihadapi dalam pencapaian peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : kurangnya dokter spesialis

4. Upaya Yang Diselenggarakan Untuk Memelihara Dan Meningkatkan Kesehatan

- a. Menurut bapak/ibu apa upaya yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ?

Jawab : menjaga kualitas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

- b. Menurut bapak/ibu bagaimana hasil upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan kesehatan ?

Jawab : baik

- c. Menurut bapak/ibu siapa yang melaksanakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ?

Jawab : seluruh pegawai RSUD

5. Usaha Untuk Memperbaiki Kesejahteraan Masyarakat

- a. Menurut bapak/ibu apa usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat ?

Jawab : melakukan penyuluhan seputar tentang kesehatan kepada masyarakat

- b. Menurut bapak/ibu apakah kondisi masyarakat saat ini sudah sejahtera?

Jawab : hanya sebagian

- c. Menurut bapak/ibu siapa yang berhak memperbaiki kesejahteraan masyarakat ?

jawab : kita semua memiliki hak untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat

6. Pelayanan Kedokteran Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ?

- a. Bagaimana pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat saat ini ?

jawab : Sudah jauh lebih meningkat

- b. Bagaimana usaha yang harus dilakukan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat ?

Jawab : selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan informasi yang jelas

- c. Apakah pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat sudah sesuai dengan yang diharapkan ?

Jawab : sudah

Pedoman Wawancara

**Judul : Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan
Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam**

Nama : Teuku agung purnama, Amd
Lama bekerja : 2 tahun
Usia : 36 tahun
Pendidikan terakhir : D3
Jabatan : Kasubbag Program
Jenis kelamin : Laki-laki

1. Adanya Pelaksanaan Keputusan Kebijakan

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam?

Jawab : Adanyanya program-program dalam pengembangan Pembangunan RSUD dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

- b. Menurut bapak/ibu apa saja keputusan yang diambil dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : seluruh staff harus memenuhi standart dan persyaratan

- c. Menurut bapak/ibu apa faktor pendukung pelaksanaan kebijakan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : adanya program untuk mendukung kebijakandan adanya kerjasama

2. Adanya Program Yang Akan Dilaksanakan

- a. Menurut bapak/ibu apa saja program yang ada di RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ?

Jawab : program medis dan program non medis

- b. Menurut bapak/ibu apa tujuan program yang dilakukan di RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ?

Jawab : meningkatkan danmelengkapi fasilitas RSUD Kota Subulussalam

- c. Menurut bapak/ibu kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan program yang dijalankan RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ?

Jawab : proses pembangunan yang lama dan kurangnya pengetahuan masyarakat

3. Adanya Tindakan Untuk Mencapai Tujuan

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana usaha yang dilakukan di RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ?

Jawab : memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat

- b. Menurut bapak/ibu tugas apa sajakah yang dilakukan RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ?

Jawab : mengadakan pelatihan dan memberi informasi kepada pegawai

- c. Menurut bapak/ibu kendala apa yang dihadapi dalam pencapaian peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : kurang dokter spesialis

4. Upaya Yang Diselenggarakan Untuk Memelihara Dan Meningkatkan Kesehatan

- a. Menurut bapak/ibu apa upaya yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ?

Jawab : memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat beserta informasi tentang kesehatan

- b. Menurut bapak/ibu bagaimana hasil upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan kesehatan ?

Jawab : baik dan berdampak positif bagi RSUD maupun masyarakat

- c. Menurut bapak/ibu siapa yang melaksanakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ?

Jawab : Seluruh pegawai RSUD

5. Usaha Untuk Memperbaiki Kesejahteraan Masyarakat

- a. Menurut bapak/ibu apa usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat ?

Jawab : memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat

- b. Menurut bapak/ibu apakah kondisi masyarakat saat ini sudah sejahtera?

Jawab : Belum

- c. Menurut bapak/ibu siapa yang berhak memperbaiki kesejahteraan masyarakat ?

jawab : Pemerintahan daerah dan kita seluruh masyarakat

6. Pelayanan Kedokteran Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ?

- a. Bagaimana pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat saat ini ?

Jawab : Sudah sangat meningkat

- b. Bagaimana usaha yang harus dilakukan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat ?

Jawab : memberikan informasi yang akurat

- c. Apakah pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat sudah sesuai dengan yang diharapkan ?

Jawab : sudah tapi harus menambah dokter spesialis

Pedoman Wawancara

**Judul : Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan
Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam**

Nama : Butet Berutu S.kep Ns
Lama bekerja : 3 Tahun
Usia : 34 Tahun
Pendidikan Terakhir : Profesi Perawat
Jabatan : Perawat
Jenis Kelamin : Perempuan

1. Adanya Pelaksanaan Keputusan Kebijakan

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : mengadakan program-program untuk peningkatan pelayanan kesehatan

- b. Menurut bapak/ibu apa saja keputusan yang diambil dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : melakukan update alat kesehatan dan data seluruh pegawai RSUD sesuai dengan standar Kemenkes

- c. Menurut bapak/ibu apa faktor pendukung pelaksanaan kebijakan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab: kemauan seluruh pegawai RSUD untuk lebih meningkatkan kebijakan-kebijakan RSUD

2. Adanya Program Yang Akan Dilaksanakan

- a. Menurut bapak/ibu apa saja program yang ada di RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ?

Jawab : Menambah Dokter, pembangunan dan penambahan alat kesehatan

- b. Menurut bapak/ibu apa tujuan program yang dilakukan di RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ?

Jawab : memberikan kepuasan bagi masyarakat dalam pelayanan kesehatan

- c. Menurut bapak/ibu Kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan program yang dijalankan RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ?

Jawab : awamnya pengetahuan masyarakat

3. Adanya Tindakan Untuk Mencapai Tujuan

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana usaha yang dilakukan di RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ?

Jawab : adanya pembangunandan penambahan fasilitas

- b. Menurut bapak/ibu tugas apa sajakah yang dilakukan RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ?

Jawab : adanya pelatihan

- c. Menurut bapak/ibu kendala apa yang dihadapi dalam pencapaian peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : tidak ada

4. Upaya Yang Diselenggarakan Untuk Memelihara Dan Meningkatkan Kesehatan

- a. Menurut bapak/ibu apa upaya yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ?

Jawab : menjaga kualitas dan mutu pelayanan serta sarana prasarana

- b. Menurut bapak/ibu bagaimana hasil upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan kesehatan ?

Jawab : sudah sangat baik

- c. Menurut bapak/ibu siapa yang melaksanakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ?

Jawab : Seluruh pegawai RSUD dan masyarakat

5. Usaha Untuk Memperbaiki Kesejahteraan Masyarakat

- a. Menurut bapak/ibu apa usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat ?

Jawab : memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat tentang kesehatan

- b. Menurut bapak/ibu apakah kondisi masyarakat saat ini sudah sejahtera?

Jawab : sebagian

- c. Menurut bapak/ibu siapa yang berhak memperbaiki kesejahteraan masyarakat ?

Jawab : pemerintah dan diri sendiri

6. Pelayanan Kedokteran Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ?

- a. Bagaimana pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat saat ini ?

jawab : sangat baik

- b. Bagaimana usaha yang harus dilakukan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat ?

Jawab : melakukan yang terbaik untuk masyarakat

- c. Apakah pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat sudah sesuai dengan yang diharapkan ?

Jawab : iya, sudah

Pedoman Wawancara

**Judul : Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan
Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam**

Nama : Fitriani, S.Kep. Ns
Lama bekerja : 2 tahun
Usia : 27 tahun
Pendidikan terakhir : Profesi Keperawatan
Jabatan : Perawat
Jenis kelamin : Perempuan

1. Adanya Pelaksanaan Keputusan Kebijakan

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : pelaksanaan program-program untuk peningkatan pelayanan kesehatan

- b. Menurut bapak/ibu apa saja keputusan yang diambil dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : mengadakan penambahan alkes dan pembahan dokter spesialis

- c. Menurut bapak/ibu apa faktor pendukung pelaksanaan kebijakan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : mematuhi peraturan RSUD sesuai kebijakan yang ditentukan

2. Adanya Program Yang Akan Dilaksanakan

- a. Menurut bapak/ibu apa saja program yang ada di RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ?

Jawab : program medis dan non medis

- b. Menurut bapak/ibu apa tujuan program yang dilakukan di RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ?

Jawab : meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan

- c. Menurut bapak/ibu kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan program yang dijalankan RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ?

Jawab : kurangnya masyarakat mengikuti prosedur

3. Adanya Tindakan Untuk Mencapai Tujuan

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana usaha yang dilakukan di RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ?

Jawab : memberi informasi yang akurat

- b. Menurut bapak/ibu tugas apa sajakah yang dilakukan RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ?

Jawab : melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar SOP

- c. Menurut bapak/ibu kendala apa yang dihadapi dalam pencapaian peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : awamnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan

4. Upaya Yang Diselenggarakan Untuk Memelihara Dan Meningkatkan Kesehatan

- a. Menurut bapak/ibu apa upaya yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ?

Jawab : pantauan terhadap pelayanan di RSUD

- b. Menurut bapak/ibu bagaimana hasil upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan kesehatan ?

Jawab : ya

- c. Menurut bapak/ibu siapa yang melaksanakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ?

Jawab : Seluruh Pegawai RSUD Kota Subulussalam dan masyarakat

5. Usaha Untuk Memperbaiki Kesejahteraan Masyarakat

- a. Menurut bapak/ibu apa usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat ?

Jawab : memberikan pelayanan kesehatan

- b. Menurut bapak/ibu apakah kondisi masyarakat saat ini sudah sejahtera?

Jawab : belum

- c. Menurut bapak/ibu siapa yang berhak memperbaiki kesejahteraan masyarakat ?

Jawab : semua orang

6. Pelayanan Kedokteran Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ?

- a. Bagaimana pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat saat ini ?

Jawab :sangat baik

- b. Bagaimana usaha yang harus dilakukan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat ?

Jawab : selalu memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat

- c. Apakah pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat sudah sesuai dengan yang diharapkan ?

Jawab : sudah, tapi perlu ditambah Dokter spesialis

Pedoman Wawancara

**Judul : Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan
Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam**

Nama : Basim saraan SE
Pekerjaan : Wiraswasta
Usia : 47 Tahun :
Jenis Kelamin : laki-laki

1. Adanya Pelaksanaan Keputusan Kebijakan

- a. Apakah bapak/ibu mengetahui kebijakan apa yang dilaksanakan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : JKN, BPJS

- b. Menurut bapak/ibu apa bagaimana pelaksanaan kebijakan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : sesuai prosedur kebijakan

- c. Menurut bapak/ibu apakah pelaksanaan kebijakan di RSUD Kota Subulussalam sudah benar?

Jawab : masih ada kendala

2. Adanya Program Yang Akan Dilaksanakan

- a. Menurut bapak/ibu apakah program yang ada di RSUD Kota Subulussalam sudah tercapai ?

Jawab :sudah

- b. Menurut bapak/ibu apa tujuan program yang dilakukan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : memberi pelayanan kesehatan

- c. Menurut bapak/ibu kendala apa saja yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakan program yang dijalankan RSUD Kota Subulussalam?

Jawab : kurangnya sosialisasi

3. Adanya Tindakan Untuk Mencapai Tujuan

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana usaha yang dilakukan di RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ?

Jawab : memberi pelayanan yang baik

- b. Menurut bapak/ibu tugas apa sajakah yang dilakukan RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ?

Jawab : mengobati dan memelihara kesehatan

- c. Menurut bapak/ibu kendala apa yang dihadapi dalam pencapaian peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam kepada masyarakat?

Jawab : kurang dokter spesialis

4. Upaya Yang Diselenggarakan Untuk Memelihara Dan Meningkatkan Kesehatan

- a. Menurut bapak/ibu apakah upaya yang dilakukan RSUD Kota Subulussalam untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ?

Jawab : obat dan pelayanan yang baik

- b. Menurut bapak/ibu bagaimana hasil upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan kesehatan ?

Jawab : sangat baik

- c. Menurut bapak/ibu siapa yang melaksanakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ?

Jawab : pemerintah, pegawai RSUD serta masyarakat

5. Usaha Untuk Memperbaiki Kesejahteraan Masyarakat

- a. Menurut bapak/ibu apa usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat ?

Jawab : kesehatan dan perekonomian

- b. Menurut bapak/ibu apakah kondisi masyarakat saat ini sudah sejahtera?

Jawab : belum

- c. Menurut bapak/ibu siapa yang berhak memperbaiki kesejahteraan masyarakat ?

Jawab : diri sendiri

6. Pelayanan Kedokteran Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ?

- a. Bagaimana pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat saat ini ?

Jawab : baik

- b. Bagaimana usaha yang harus dilakukan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat ?

Jawab : memberi pelayanan yang baik

- c. Apakah pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat ?

Jawab : belum sepenuhnya

Pedoman Wawancara

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam

Nama : Nur Amrita S.Pd
Pekerjaan : Guru
Usia : 35 Tahun :
Jenis Kelamin : Perempuan

1. Adanya Pelaksanaan Keputusan Kebijakan

- a. Apakah bapak/ibu mengetahui kebijakan apa yang dilaksanakan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : ada kebijakan JKN

- b. Menurut bapak/ibu bagaimana pelaksanaan kebijakan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : kebijakan yang meringankan masyarakat

- c. Menurut bapak/ibu apakah pelaksanaan kebijakan di RSUD Kota Subulussalam sudah benar?

Jawab : masih ada kendala

2. Adanya Program Yang Akan Dilaksanakan

- a. Menurut bapak/ibu apakah program yang ada di RSUD Kota Subulussalam sudah tercapai ?

Jawab : sudah

- b. Menurut bapak/ibu apa tujuan program yang dilakukan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : melayani kesehatan kepada masyarakat

- c. Menurut bapak/ibu kendala apa saja yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakan program yang dijalankan RSUD Kota Subulussalam?

Jawab : kurangnya pengetahuan mengikuti prosedur

3. Adanya Tindakan Untuk Mencapai Tujuan

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana usaha yang dilakukan di RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ?

Jawab : mencapai tujuan mereka

- b. Menurut bapak/ibu tugas apa sajakah yang dilakukan RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ?

Jawab : memberi pelayanan kesehatan

- c. Menurut bapak/ibu kendala apa yang dihadapi dalam pencapaian peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam kepada masyarakat?

Jawab : kurang dokter spesialis

4. Upaya Yang Diselenggarakan Untuk Memelihara Dan Meningkatkan Kesehatan

- a. Menurut bapak/ibu apakah upaya yang dilakukan RSUD Kota Subulussalam untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ?

Jawab : memberi pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat

- b. Menurut bapak/ibu bagaimana hasil upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan kesehatan ?

Jawab : baik

- c. Menurut bapak/ibu siapa yang melaksanakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ?

Jawab : pihak rumah sakit

5. Usaha Untuk Memperbaiki Kesejahteraan Masyarakat

- a. Menurut bapak/ibu apa usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat ?

Jawab : menjaga dan meningkatkan kesehatan

b. Menurut bapak/ibu apakah kondisi masyarakat saat ini sudah sejahtera?

Jawab : belum

c. Menurut bapak/ibu siapa yang berhak memperbaiki kesejahteraan masyarakat ?

Jawab : masyarakat, pegawai RSUD dan pemerintah

6. Pelayanan Kedokteran Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ?

a. Bagaimana pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat saat ini ?

Jawab : pelayanan yang diberikan sesuai tingkatan

b. Bagaimana usaha yang harus dilakukan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat ?

Jawab : harus memberi pelayanan yang baik

c. Apakah pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat ?

Jawab : sudah

Pedoman Wawancara

**Judul : Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan
Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam**

Nama : Yuyun Anggraini
Pekerjaan : IRT
Usia : 30 Tahun :
Jenis Kelamin : Perempuan

1. Adanya Pelaksanaan Keputusan Kebijakan

a. Apakah bapak/ibu mengetahui kebijakan apa yang dilaksanakan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : JKN dan BPJS

b. Menurut bapak/ibu apa bagaimana pelaksanaan kebijakan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : dilakukan sesuai prosedur

c. Menurut bapak/ibu apakah pelaksanaan kebijakan di RSUD Kota Subulussalam sudah benar?

Jawab : sudah

2. Adanya Program Yang Akan Dilaksanakan

a. Menurut bapak/ibu apakah program yang ada di RSUD Kota Subulussalam sudah tercapai ?

Jawab : tidak tahu

b. Menurut bapak/ibu apa tujuan program yang dilakukan di RSUD Kota Subulussalam ?

Jawab : memberi pelayanan kesehatan

- c. Menurut bapak/ibu kendala apa saja yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakan program yang dijalankan RSUD Kota Subulussalam?

Jawab : sulitnya mengikuti peraturan

3. Adanya Tindakan Untuk Mencapai Tujuan

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana usaha yang dilakukan di RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ?

Jawab : mengobati dan memelihara kesehatan

- b. Menurut bapak/ibu tugas apa sajakah yang dilakukan RSUD Kota Subulussalam dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ?

Jawab : memberi pelayanan kesehatan

- c. Menurut bapak/ibu kendala apa yang dihadapi dalam pencapaian peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Subulussalam kepada masyarakat?

Jawab : administrasi yang lambat

4. Upaya Yang Diselenggarakan Untuk Memelihara Dan Meningkatkan Kesehatan

- a. Menurut bapak/ibu apakah upaya yang dilakukan RSUD Kota Subulussalam untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ?

Jawab : pelayanan dan obat yang baik

- b. Menurut bapak/ibu bagaimana hasil upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan kesehatan ?

Jawab : baik

- c. Menurut bapak/ibu siapa yang melaksanakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ?

Jawab : pemerintah dan pegawai RSUD

5. Usaha Untuk Memperbaiki Kesejahteraan Masyarakat

- a. Menurut bapak/ibu apa usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat ?

Jawab : Meningkatkan perekonomian

- b. Menurut bapak/ibu apakah kondisi masyarakat saat ini sudah sejahtera?

Jawab : belum

- c. Menurut bapak/ibu siapa yang berhak memperbaiki kesejahteraan masyarakat ?

Jawab : diri sendiri

6. Pelayanan Kedokteran Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ?

- a. Bagaimana pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat saat ini ?

Jawab : baik

- b. Bagaimana usaha yang harus dilakukan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat ?

Jawab : memberi pelayanan kesehatan yang baik

- c. Apakah pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat ?

Jawab : belum sepenuhnya